

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini tanggung jawab sosial perusahaan masih menjadi topik yang sangat hangat di perbincangkan di banyak negara termasuk Indonesia. Isu tanggung jawab sosial ini muncul dan berkembang ketika banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Berkembangnya beberapa perusahaan atau bisnis industri dapat memberikan dampak *positive* maupun *negative* bagi masyarakat yang berada disekitarnya. Perusahaan dianggap banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, memberikan sumbangan dan lain-lain. Namun disisi lain, keberadaan perusahaan juga banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti halnya populasi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi serta bentuk *negative externalities*. Adanya dampak lingkungan sosial ini juga mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan CSR. Oleh karena itu, perusahaan harus melaksanakan peran sosial yang lebih nyata untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan dengan cara, “bagaimana perusahaan harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan operasionalnya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan baik dan meminimalkan kerugian yang terjadi akibat kegiatan tersebut. Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat digunakan sebagai suatu hal yang dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup perusahaan dan seluruh para pemangku kepentingannya atau *stakeholder*. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, artinya suatu organisasi, khususnya perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya tidak semata keputusannya berdasarkan dampak ekonomi (seperti tingkat keuntungan atau dividen), tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengungkapan sosial dan lingkungan suatu perusahaan merupakan hal yang sama pentingnya dengan informasi *financial* dengan memberikan gambaran mengenai keadaan finansial perusahaan serta dapat memberikan informasi apakah kondisi keuangan perusahaan tersebut sehat, tidak sehat, atau kurang sehat. Salah satu perusahaan yang perlu dinilai tingkat kesehatan keuangannya adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menilai tingkat kesehatan BUMN berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN no: KEP-100/MBU/2002 yang berisi ketentuan atau tata cara untuk menilai tingkat kesehatan BUMN. Penilaian tingkat kesehatan meliputi penilaian terhadap aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Penilaian tiga aspek dilakukan dengan memberikan bobot penilaian yang nantinya dari total bobot yang diperoleh akan dibandingkan dengan kategori kesehatan BUMN.

Penilaian terhadap aspek keuangan menggunakan delapan yaitu ROE, ROI, *cash ratio*, *current ratio*, *collection periods*, perputaran persediaan, TATO dan rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset (TMS terhadap TA). Penilaian terhadap aspek operasional meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam menunjang operasional perusahaan. Penilaian terhadap administrasi menggunakan empat indikator yaitu laporan perhitungan tahunan, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), laporan periodik dan Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Peneliti hanya menggunakan penilaian aspek administrasi yang indikator penilaiannya dapat dilihat dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan (BUMN KEP-100/MBU/2002, 2002).

Selain informasi finansial, sosial dan lingkungan juga mencerminkan kondisi perusahaan, terutama bagaimana kontribusi perusahaan terhadap masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Perseoran Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Bab V pasal 74 ayat (1) menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib (*mandatory*) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu dalam ayat (3)

menjelaskan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Www.ojk.go.id, n.d.).

Selain itu, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 berkaitan dengan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dengan sangat tegas menyatakan bahwa PKBL sebagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bagi perusahaan BUMN kegiatan CSR telah menjadi suatu kegiatan yang bersifat wajib (*mandatory*) (Bumn.go.id, n.d.).

Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan BUMN memiliki berbagai dampak terhadap lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Perusahaan BUMN dituntut untuk mengelola dampak dari kegiatan perusahaan agar memungkinkan terciptanya pembangunan berkelanjutan. Perusahaan BUMN juga harus mengungkapkan kegiatan dan berbagai dampak yang di hasilkan dari aktivitas operasionalnya dalam bentuk laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Laporan tersebut disajikan sesuai dengan pedoman yang telah di tentukan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI), yang di dalamnya berisi terkait dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini merupakan upaya BUMN agar *transparency* dan *akuntable* dalam melakukan pelaksanaan CSR. Oleh karena itu sebagian perusahaan negara dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan mampu berpijak pada *triple bottom line* yaitu tanggung jawab untuk mencari keuntungan (*profit*), memberdayakan masyarakat (*people*), dan memelihara kelestarian bumi (*planet*) (Hadi, 2018).

Di Indonesia praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah mendapat perhatian yang cukup besar. Kasus di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang muncul dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan operasinya kurang memperhatikan kondisi dan lingkungan sekitarnya, khususnya perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Maka seharusnya pengungkapan tanggung jawab sosial dilatarbelakangi oleh kualitas akan keterbukaan informasi terkait aktivitas maupun kondisi lingkungan perusahaan.

Di Indonesia sendiri memiliki perusahaan pertambangan yang di pegang oleh pemerintahan seperti PT. Aneka Tambang Tbk. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan BUMN sektor pertambangan merupakan salah satu tonggak pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial suatu negara karena perannya dalam menghasilkan sumber daya energi bagi masyarakat dalam menjalankan sistem ekonominya. Selain sektor pertambangan, sektor lain yang memiliki andil besar dalam pembangunan dan pencemaran lingkungan adalah sektor konstruksi, minyak dan gas. Akan tetapi muncul permasalahan-permasalahan di dalam operasional masyarakat maupun adanya kepentingan perusahaan dalam pengelolaan sektor tersebut di Indonesia. Masalah yang timbul akibat operasional tambang tentunya berkaitan dengan imbas limbah yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan. Masalah juga timbul akibat operasional pembangunan infrastruktur yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti merubah lahan hijau dan hutan yang ditebas habis menjadi jalan tol dan pencemaran sektor gas berupa emisi karbon yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek sosial untuk berkontribusi dalam pengembangan masyarakat.

Fenomena yang terjadi pertama yaitu pemanfaatan dana CSR PT Aneka Tambang Tbk. yang tidak tepat sasaran dan penuh dengan penyimpangan. Pemanfaatan dana CSR baik itu *Community Development* (Comdev) maupun Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), terjadi penyimpangan dalam prosedur penggunaannya. Pemanfaatan dana CSR Antam digunakan untuk pembangunan bandara Sangia Nibandera. Dalam hal ini seharusnya dana CSR diserahkan kepada masyarakat sebagai sasarannya, baik itu secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat pendamping (Nasional.tempo.co, 2014).

Fenomena yang terjadi kedua yaitu dimana aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan akan mengurangi pendapatan atau pajak perusahaan tersebut. Kepemilikan intitusional yang kosennya lebih kepada pemerintah dengan cara mengawasi kinerja BUMN yaitu salah satunya mengawasi ukuran kinerja ROI (laba). Tujuan BUMN didirikan yaitu untuk mendapatkan pendapatan atau pemasukan kepada negara. Akan tetapi disisi lain CSR dilihat sebagai *cost* yang

akan mengurangi laba. Sehingga menariknya disini pemerintah memiliki kepentingan dalam kepemilikan institusional untuk meningkatkannya tetapi dengan adanya kegiatan CSR yang menjadi *cost* (biaya) akan mengurangi pendapatan perusahaan. Pemerintah dalam kepemilikan institusional yang besar wajib melakukan pengungkapan CSR, tetapi disatu sisi wajib juga meningkatkan sumbangan atau pendapatan kepada negara melalui pajak. Pendapatan dan CSR ini penting dilakukan perusahaan, oleh karena itu mana yang perusahaan ingin utamakan. Apakah perusahaan akan mengorbankan pendapatannya demi kegiatan CSR yang tinggi. Sehingga perusahaan perlu menyeimbangkan antara pendapatan atau pemasukan kepada negara melalui pajak dan tetap menjalankan CSR tanpa mengabaikan tanggung jawab sosialnya.

Dalam fenomena-fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus tersebut muncul karena adanya penyimpangan yang terjadi, seperti pemanfaatan dana CSR yang tidak tepat sasaran dan praktik-praktik yang tidak baik lainnya. Jika perusahaan sudah mengungkapkan CSR dengan baik artinya perusahaan tidak berbohong dalam hal pengungkapan CSR. Akan tetapi dalam praktiknya yang dapat dilihat CSR hanya sekedar dengan mengeluarkan uang (*cost*), tetapi dalam hal manfaatnya tidak terlalu diperhatikan, maka ketika berbicara tentang pengungkapan artinya perusahaan juga berbicara tentang kualitas atas pengungkapan CSR. Oleh karena itu, yang ingin peneliti lihat disini bukan hanya sekedar pengungkapan yang dilakukan perusahaannya saja, akan tetapi juga untuk melihat kualitas terhadap pengungkapan tersebut. Kualitas pengungkapan dapat di lihat dari segi kecukupan informasi, transparansi dan akuntabilitasnya. Sehingga pengungkapan CSR perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kepemilikan institusional dan *slack resources*.

Faktor pertama yang di pengaruhi pengungkapan CSR yaitu kepemilikan institusional. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih ketat untuk memonitor kinerja manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kegiatan sosial perusahaan sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Sehingga kepemilikan institusional dipandang mempunyai kemampuan yang efektif dalam mengawasi aktivitas manajemen dan investor institusional cenderung berpihak pada manajemen dan

lebih mendahulukan kepentingan investor institusional dibandingkan kepentingan pemilik, sehingga dapat menjadi sinyal positif bagi para investor untuk melakukan aksi beli saham yang berdampak pada peningkatan pengungkapan CSR (Apriyanto et al., 2020).

Faktor kedua yang di pengaruhi pengungkapan CSR yaitu *slack Resources*. *Slack resources* memiliki arti kelonggaran sumber daya yang dimiliki perusahaan, hal ini dimana ketersediaan keuangan perusahaan melebihi kebutuhan mereka yang kemudian digunakan untuk membantu pembiayaan organisasi. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan bernilai bagi pengelolaan sumber daya perusahaan adalah pengambilan keputusan (*discretionary*) pendanaan perusahaan. Agar manajer lebih leluasa dalam mengambil keputusan pendanaan, maka digunakan *high discretionary financial slack*, yaitu kebijakan maksimum dimana dalam melakukan inovasi, manajer akan membuat keputusan berdasarkan aliran kas perusahaan. Oleh karena itu yang paling penting harus dilihat adalah kemampuan atau ketersediaan kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Akan tetapi, dalam hal ini tidak semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki *slack resources* yang bagus, bahkan juga terdapat yang belum bagus. Kelebihan menggunakan arus kas yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan telah mengelola aset atau sumber dayanya dengan baik. Sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan yang dapat disebut juga dengan *going concern* atau keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, keberlanjutan perusahaan ini sangat ditentukan oleh *slack resources* (Shoimah & Aryani, 2019).

Terdapat kesenjangan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya kepemilikan institusional dan *slack resources*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa Fitriana (2019) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI”. Menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Selanjutnya hasil penelitian Yani & Suputra (2020) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh

Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Pengungkapan Coporate Social Responsibility”. Menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Hasil penelitian Anggraeni & Djakman, 2017 dalam jurnal yang berjudul “*Slack Resources, Feminisme Dewan, dan Kualitas pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*”. Menyatakan bahwa *slack resources* berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian Hasanah et al., 2019 dalam jurnal yang berjudul “*Slack Resources, Rapat Dewan Komisaris dan Feminisme Dewan Direksi Terhadap Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*”. Juga menyatakan bahwa *slack resources* berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk menguji kembali hubungan kepemilikan institusional dan *slack resources* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya yang menyebabkan isu ini menjadi topik yang penting untuk di teliti. Penelitian dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana perusahaan BUMN melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkan CSR pada laporan tahunan yang hubungannya dengan besarnya kepemilikan institusional dan *slack resources* pada perusahaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan *Slack Resources* terhadap Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) (Studi Kasus pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2016-2020)”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

2. Bagaimana pengaruh *slack resource* terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bahwa kepemilikan institusional dan *slack resource* merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan reputasi atau citra perusahaan dan legitimasi perusahaan di mata masyarakat. Oleh karena itu, tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pengaruh kepemilikan saham institusional dengan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR)
2. Untuk menganalisa pengaruh *slack resource* dengan pengungkapan tanggung sosial (CSR)

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh kepemilikan saham institusional dan *slack resource* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi terutama akuntansi dan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya serta diharapkan dapat digunakan untuk tambahan referensi dan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai metode penelitian yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

- b. Bagi akademisi, memberikan informasi bahwa kepemilikan institusional dan *slack resource* merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam melihat pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan dikarenakan kebutuhan akan legitimasi perusahaan di dalam masyarakat.
- c. Bagi perusahaan, menjadikan perusahaan lebih sadar terhadap pengungkapan pertanggung jawaban sosial di masa mendatang, seperti halnya pengungkapan pertanggung jawaban sosial yang dilakukan oleh negara-negara barat sebagai salah satu informasi yang penting.
- d. Bagi pemegang saham atau *shareholder* dan pemangku kepentingan atau *stakeholder*, bahwa kepemilikan institusional dan *slack resource* merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan karena kebutuhan akan legitimasi perusahaan di dalam masyarakat dan untuk melihat keuntungan jangka panjang yang akan didapat oleh perusahaan yakni citra dan reputasi perusahaan melalui nilai saham perusahaan.
- e. Bagi pemerintah, untuk mengetahui sampai sejauh mana pengungkapan pertanggung jawaban sosial yang telah dilakukan perusahaan. Sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan suatu standar pelaporan tanggung jawab sosial (CSR) yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak meluas, terarah dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka pembatasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Periode pengamatan 5 tahun yaitu tahun 2016-2020.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan institusional yang diukur dengan persentase saham milik pemerintah dan *slack resources* yang diukur dengan nilai dari kas dan setara kas perusahaan.

3. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diukur dengan menggunakan indikator standar GRI-G4.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisan pembahasan terdiri dari lima bab utama, meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan serta simpulan, implikasi dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Secara rinci penelitian ini memuat:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti dalam pemilihan topik penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan masalah serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, kepemilikan institusional dan *slack resources* serta menguraikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini membahas tentang desain penelitian, tahapan dalam penelitian, model konseptual, definisi operasional variabel, waktu dan tempat dilakukannya penelitian, metode pengambilan populasi dan sampel, jenis data dan sumber data penelitian serta teknik analisis data. Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini membahas mengenai profil organisasi atau perusahaan tempat penelitian penelitian secara singkat dan umum, analisis data penelitian serta pembahasan mengenai hasil dari penelitian. Bab V Simpulan, Implikasi dan Saran, bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi serta berisi saran-saran yang nantinya akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.